

Opini Publik Cerminan dari Pemerintah dan Kebijakannya

Public Opinion Reflection of Government and Policies

Itsna Hidayatul Khusna

Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasakti Tegal

Jl. Halmahera km.1 Tegal Jawa Tengah

itshidayatukhusna@gmail.com / 081327666736

Abstract

Public opinion refers to public attitudes to a problem when they are members of the same social group. Public opinion is essentially irrational but based on attitudes that in turn is based on emotions, prejudices, stereotypes, etc., that are present in the culture of origin. Public opinion is not there just yet formed, that an opinion should be regarded as public opinion when there is agreement that these problems are shared problems. Public opinion is the embodiment of a democracy. Democracy is based on the principle of political-philosophical self-determination. It assumes that individuals are best suited to determine their fate, as stated in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights. "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood". A reflection of a government is a policy born. Dissatisfaction with the policies made by the government will have an impact on public attitudes. However, the question arises whether public or otherwise influence government policy, all depending on the factors that influence public opinion as a social environment, friends, family, school, work, or religious groups. The mass media, new media, opinion leaders also have an important role. In developing countries, in addition to these factors is the big problem is on literacy.

Keyword: *Public, Opinion, Government*

Abstraksi:

Opini publik pada dasarnya tidak rasional tetapi didasarkan pada sikap yang pada gilirannya didasarkan pada emosi, prasangka, stereotip, dan sebagainya yang merupakan ada dalam budaya asal. Opini publik tidak ada begitu saja tetapi dibentuk, bahwa suatu opini itu bisa dikatakan sebagai opini publik saat ada kesepakatan bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan bersama. Opini publik merupakan perwujudan dari sebuah demokrasi. Demokrasi didasarkan pada prinsip politik-filosofis penentuan nasib sendiri. Ini mengasumsikan bahwa individu yang paling cocok untuk menentukan nasib mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. "Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu lain dalam semangat persaudaraan ".Cerminan dari sebuah pemerintah adalah dari kebijakan yang dilahirkan. Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak pada sikap publik. Namun demikian timbul pertanyaan apakah publik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah atau sebaliknya, semua tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik seperti lingkungan sosial, teman, dll. Media massa, new media, opinion leader juga mempunyai peran yang penting. masalah yang besar adalah ada pada literasi.

Kata kunci: Publik, Opini, Pemerintahan

I. PENDAHULUAN

Mcdoulall (1952) memberikan pengertian opini publik secara kasar sebagai ekspresi pada sebuah poin/titik yang kontroversial dalam suatu kelompok kepentingan. Dari beberapa penulis, opini publik sudah digunakan untuk mengartikan sebagai berikut: (1) kelompok pemikiran (*group mind*), (2) kesadaran kolektif (*collective consciousness*) (3) sikap dan pendapat di bidang politik (*attitudes and opinion in the field of politics only*). (4) pendapat utuh (*unanimous opinioins*), (5) meluasnya kepercayaan, kesepakatan, (*widespread beliefs, consensus, settled convictions*), (6) Sosial (*social*), (7) opini dari orang yang berpendidikan (*the opinions of educated persons only*), (8) sebuah proses pengembangan opini daripada hasil akhirnya (*the process of developing opinions rather than the end products*), dan (9) pendapat tercapai hanya sebagai hasil dari pemikiran rasional (*only opinions reached as a result of rational thought*). (Mcdoulall, 1952)

Beberapa pendapat mengenai opini publik, seperti dari Leonard Doob dalam *Public Opinion and Propaganda* mengartikan bahwa : opini publik mengacu pada sikap masyarakat terhadap suatu masalah ketika mereka adalah anggota dari kelompok sosial yang sama. Opini publik pada dasarnya tidak rasional tetapi didasarkan pada sikap yang pada gilirannya didasarkan pada emosi, prasangka, stereotip, dan sebagainya yang merupakan ada dalam budaya asal. (Macdoulall, 1952)

Dari berbagai pengertian opini publik di atas, opini publik bisa diuraikan sebagai (1) publik, dan (2) opini, karena keduanya merupakan bagian utuh yang memang harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mengetahui apa sebenarnya itu opini publik.

a. Publik

Publik dari beberapa penulis diartikan sebagai: (1) kelompok yang cukup besar; (2) kelompok dari berbagai ukuran dimana setiap anggota sedikit banyak sadar akan kepentingan bersama; (3) terdiri dari semua orang yang mampu berpikir dalam suatu kelompok wilayah tertentu. (Macdoulall, 1952)

Karakteristik yang membedakan publik, secara umum yang disepakati oleh para ahli, antara lain:

- a. Publik tidak ditentukan atau berlokasi secara geografis. Publik bukanlah kedekatan atau hidup bersama tetapi kebersamaan yang menarik yang merupakan ikatan antara anggota masyarakat. Publik mungkin ada dalam komunitas besar dan mungkin melampaui batas-batas komunitas kecil.
- b. Tidak ada hal seperti publik itu sendiri. Mencoba untuk menentukan seberapa banyak dan apa publik itu ada adalah sedikit dari pengalaman yang membuat frustrasi.
- c. Anggota dari publik memiliki rasa memiliki. Publik berfungsi hanya jika anggotanya berfungsi bersama.

d. Publik bukanlah organisasi formal atau asosiasi. Ikatan antara anggota publik, sekali lagi mengulangi sebuah titik yang sudah dilakukan beberapa kali merupakan timbal balik dari kepentingan, bukan lokalitas, kebangsaan, ras, atau kewarganegaraan di suatu negara. Publik tidak mempunyai iuran keanggotaan, pegawai, dan pertemuan rutin. Semua anggota dari publik, bagaimapapun juga, tidak bergabung dalam asosiasi yang sama, mungkin mereka malah tidak pernah bergabung.

Publik merupakan sekumpulan individu bisa besar atau kecil (tidak bisa diukur berdasar jumlah) memiliki kesukaan yang berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda juga, berasal dari tidak hanya yang mendiami suatu wilayah (tidak bisa diidentifikasi secara geografi), tidak berbentuk suatu organisasi yang memiliki keanggotaan yang jelas dengan aturan-aturannya yang dibukukan, tetapi publik memiliki rasa memiliki. Dari pengertian ini, betapa susahanya publik itu diidentifikasi secara jelas.

b. Opini

Saat mengartikan opini, harus bisa membedakan terlebih dahulu antara keyakinan (*beliefs*) dan opini, karena keyakinan bukanlah opini. Keyakinan adalah apa yang kita "tahu" itu benar; opini adalah apa yang kita "pikir" adalah benar. Albig mendefinisikan opini adalah sebuah ekspresi dalam titik

kontroversial, mengindikasikan bahwa kapan pun itu sebuah opini ada, opini yang lain dalam persoalan yang sama juga ada (Macdoulall, 1952). Opini merupakan hasil akhir dari produk psikologi. Bahwa sebuah opini individu itu dibentuk tidak ditemukan.

Opini yang merupakan sesuatu yang kita anggap itu benar sejatinya tidak lahir begitu saja saat manusia dilahirkan, tetapi opini itu dibentuk. Opini merupakan hasil dari proses psikologi, ada sebuah alasan dibalik sebuah alasan itu ada. Opini bisa dipicu dari sebuah opini yang lain. Opini juga merupakan sekumpulan gambaran yang ada dikepala kita, sebuah ide gagasan.

Maka, dari penjelasan di atas opini publik bisa diartikan sebagai sebuah sikap, ide dan gagasan yang publik pertukarkan yang disepakati bersama menjadi masalah bersama secara makro. Opini publik tidak ada begitu saja tetapi dibentuk, bahwa suatu opini itu bisa dikatakan sebagai opini publik saat ada kesepakatan bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan bersama. Tidak bisa diukur apa itu yang menjadi kesepakatan bersama yang dikatakan sebagai opini. Bisa itu berupa permasalahan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dll. Opini publik tidak bisa diikat dalam konsep ruang dan waktu karena opini publik bisa lenyap begitu saja dan bisa saja semakin kuat, tergantung bagaimana opini itu dimainkan. Opini publik juga merupakan sebuah cerminan dari demokrasi, dan opini publik bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

II. PEMBAHASAN

Opini publik muncul pada abad ke 18, di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Seiring dengan industrialisasi, perkembangan demokrasi, perkembangan ekonomi. Di masa ini individu sudah mulai sadar akan hak-haknya sebagai manusia. Demokrasi sebagai salah satu sistem politik berkembang, yang tadinya demokrasi itu bergerak dari representatif beralih ke elektoral. Ide tentang opini publik, dan arti pentingnya, muncul bersamaan dengan traktat yang ditulis oleh Rousseau yang memperkenalkan konsep *general will*, yang kadang dipertukarkannya dengan istilah *l'opinion publique* atau opini publik (www.cdn.salihara.org). Gagasan Rousseau ini radikal namun sederhana, bahwa sebuah pemerintahan secara etis dianggap legitimate jika penyelenggaraan pemerintahan bertolak dari kehendak umum, the *general will*. Gagasan itu radikal karena pada masanya orang belum banyak berbicara tentang kedaulatan rakyat, dan demokrasi baru terlihat samar-samar di horizon para pemikir politik masa itu, dan ketika mode pemerintahan yang populer saat itu adalah otokrasi dalam format kerajaan. Kelak kita menyambungkan ide sederhana Rousseau ini dengan kompleksitas demokrasi dalam kehidupan politik modern. Dan kelak kita menghubungkan *general will* ini dengan opini publik.

Opini publik merupakan perwujudan dari sebuah demokrasi. Demokrasi didasarkan pada prinsip politik-filosofis penentuan nasib sendiri. Ini mengasumsikan bahwa individu yang

paling cocok untuk menentukan nasib mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. "Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu lain dalam semangat persaudaraan ". Kepastian ini dianggap apriori untuk prinsip demokrasi dan mengatakan bahwa orang bebas memiliki hak alami untuk membentuk politik, ekonomi, sosial dan budaya lingkungan yang mereka anggap baik.

Opini publik menentukan sehat tidaknya sebuah demokrasi di dalam suatu pemerintahan. Opini publik merupakan keseimbangan dari informasi politik dan pengetahuan politik. Keseimbangan informasi bisa diperoleh salah satu faktor terbesarnya adalah karena adanya demokrasi. Dan opini publik merupakan representasi seseorang dalam kehidupan berdemokrasi. Di dalam sebuah pemerintahan yang demokratis, perlindungan akan hak merupakan hal yang penting yang ada dalam tanggung jawab pemerintah. Cerminan dari sebuah pemerintah adalah dari kebijakan yang dilahirkan. Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak pada sikap publik yang kemudian secara bersama menjadi sebuah permasalahan bersama. Salah satu penyebabnya adalah adanya kerugian yang lahir akibat kebijakan yang dibuat atau sebuah perasaan bahwa hak-haknya belum terpenuhi dalam kebijakan yang dibuat.

Opini publik yang kuat bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kasus “cicak vs buaya” bisa dilihat bagaimana opini publik yang tidak bisa dibendung akhirnya membebaskan mantan ketua KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamsah dalam kasus dugaan penyuapan. Opini publik mampu menghentikan proses peradilan yang sedang berlangsung. Atau dalam kasus Prita Mulyasari dengan kasus surat elektroniknya yang berisi keluhan atas RS Omni Internasional. Surat elektronik tersebut membawa Prita ke dalam jeratan hukum karena dianggap mencemarkan nama baik RS Omni Internasional. Kasus ini kemudian mencuat ke permukaan dan publik terus bergerak dalam opininya. Sampai pada akhirnya lahir gerakan “Koin Peduli Prita”, dimana gerakan ini lahir karena Prita dituntut secara perdata dan harus mengganti rugi sejumlah uang kepada RS Omni Interansional. Akhirnya kasus ini membawa publik dalam sikap-sikap yang lain, bahwa UU ITE yang dibuat malah membekukan kebebasan berekspresi, ada sikap lain bahwa kasus tersebut kasus gender, bahkan kemudian penelaahan mengenai standar rumah sakit internasional.

Bagaimana dengan yang kita ketahui tentang kasus Century, kasus Nazarudin, kebijakan kenaikan BBM tahun 2012, kasus mesuji, kasus pemerkosaan di angkot, kasus kecelakaan mobil Xenia yang dikendarai oleh Afriani, kasus sandal jepit, kasus nenek Minah, kasus lumpur Lapindo, dll. Beberapa kasus tersebut timbul tenggelam dan timbul lagi. Saat membahas opini

publik jangan dilupakan bahwa saat ada opini publik yang mencuat maka akan ada opini publik yang mencuat. Dari beberapa opini publik tersebut juga berhasil mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tetapi diantaranya hanyalah sebagai pengalihan isu atas kasus yang lain.

Opini publik juga bisa dilihat dari polling yang ada. Beberapa polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey juga merupakan representasi dari opini publik. Polling ini juga bisa sebagai dasar sikap individu dalam melihat sebuah masalah. Misalnya saja polling mengenai kepercayaan publik terhadap pemerintah atau presidennya. Kepercayaan publik terhadap partai politik. Kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan hal biasa dan hanya bisa terjadi disebuah negara yang demokratis. Walaupun kemudian diantaranya menyerang pemerintah, tetapi itu wajar di sebuah negara yang demokratis. Indonesia yang merupakan negara yang menyatakan sebagai negara demokrasi, berkembang dengan opini publik. Hal ini terasa sekali saat dibandingkan dengan pemerintah orde baru yang otoriter. Dimana ruang-ruang publik untuk beropini dibelenggu, pers dan kebebasan berpendapat. Pemerintah yang otoriter yang tidak menyediakan ruang-ruang publik malah justru akan mengakumulasi publik atas kesadarannya akan hak-hak yang tidak terpenuhi dan ini terbukti menghancurkan pemerintah di tahun 1998.

Opini publik itu diperlukan untuk mengukur berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan dan kebijakan yang dibuat. Walaupun kemudian sebenarnya masih dalam area abu-abu apakah benar sebuah opini publik benar-benar mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat. Seperti dicontohkan pada kasus “cicak vs buaya”, walaupun kemudian lahir gerakan-gerakan dari publik yang pada akhirnya mencuatkan kasus ini kepada dugaan konspirasi hukum dan politik, tetapi kita tidak pernah tahu apakah keputusan yang diambil pemerintah itu murni atas dorongan opini publik. Karena banyak pemain yang ada dibelakang kasus tersebut, baik yang pro atau yang kontra.

Karena hanya publik yang dapat dimobilisasi yang mengekspresikan sikap mereka dengan cara yang berarti, hanya opini mereka yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Untuk menempatkan masalah ini dengan cara lain, pemerintah tidak bisa menanggapi sikap yang tidak diungkapkan. Selain itu, perlu dicatat di sini bahwa ada tiga jenis publik yang dapat dibedakan (<http://www.templejc.edu/dept/Govt/feagin/govt2301/ppt/opinion.ppt>) :

- a. Publik Satu isu - kumpulan individu yang memperhatikan dan dapat dimobilisasi pada satu isu atau kisaran sempit isu-isu;
- b. Publik Organisasi - kumpulan individu yang memperhatikan dan dapat dimobilisasi pada isu-isu yang mempengaruhi organisasi atau keanggotaannya (karakteristik mendefinisikan jenis publik adalah adanya organisasi formal);

- c. Publik Ideologis - kumpulan individu yang memperhatikan dan dapat dimobilisasi pada setiap masalah yang berhubungan dengan ideologi. Suatu ideologi (digunakan secara longgar dalam konteks ini) mengacu pada seperangkat prinsip politik, sosial, ekonomi, agama, moral, etika, atau masyarakat, cita-cita, atau nilai-nilai.

Ada beberapa karakteristik dari opini publik yang mungkin, pada masalah ini, mempengaruhi respon pemerintahan:

- a) Distribusi - mengacu pada kekuatan numerik (biasanya dinyatakan sebagai persentase atau rasio) dari berbagai pendapat yang diselenggarakan atas suatu problem.
- b) Intensitas - ini mengacu pada kekuatan perasaan pada publik yang memegang sikapnya (atau tingkat komitmen publik harus pada posisinya). Jajak pendapat masyarakat umum hanya melaporkan distribusi opini yang objektif tentang suatu masalah. Bahkan ketika survei dirancang untuk memberikan pilihan responden untuk mengungkapkan seberapa intens mereka "merasa" pada suatu masalah, tidak ada usaha dibuat untuk menentukan bagaimana opini mereka dapat dimobilisasi. Intensitas, dalam konteks ini kemudian, mengacu pada kekuatan perasaan karena mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk dimobilisasi. Bisa jadi, pada beberapa isu, pemerintah membuat kebijakan publik sesuai dengan pendapat dari publik yang kecil, tetapi publik minoritas intens (sangat

dimobilisasi) daripada pendapat besar, tapi lemah (tidak dimobilisasi) pada publik mayoritas.

- c) Stabilitas - Stabilitas mengacu pada baik itu distribusi dan intensitas opini dari waktu ke waktu. Pada beberapa masalah, ini relatif stabil (misal, kontrol senjata, aborsi). Pada masalah lain (terutama masalah pemilu), pendapat bisa agak tidak stabil, kadang-kadang bergeser secara dramatis selama periode singkat. Pembuat keputusan mungkin ingin tahu sesuatu tentang stabilitas opini sebelum memeluk alternatif kebijakan tertentu atau mengasosiasikan dirinya terhadap kandidat untuk jabatan yang lain.
- d) Latency - Opini mungkin ada hanya sebagai potensi. Latency mengacu pada karakteristik dari pendapat yang belum mengkristal. Opini laten berhubungan dengan sikap yang bukan tentang setiap masalah khusus, namun penilaian keprihatinan umum tentang arah (misal, "Apakah negara, negara, atau kota menuju ke arah yang benar?"). Ini disebut masalah valensi. Masalah valensi paling relevan dengan penilaian kinerja kepemimpinan. Seringkali, masalah valensi (dan pendapat laten) lebih penting daripada isu-isu spesifik dalam mendikte nasib politik presiden, gubernur, dan walikota.
- e) Arti-penting - Arti mengacu pada sejauh mana isu tertentu mempengaruhi publik tertentu. Arti-penting dari sebuah isu tampaknya akan mempengaruhi karakteristik sebelumnya yang ditunjukkan opini (distribusi, intensitas, stabilitas).

Hubungan antara opini publik massa dan kebijakan publik merupakan inti dari teori normatif demokratis. Pemerintah responsif terhadap keinginan massa merupakan dasar konsepsi paling demokrasi (Lijphart, 1984; Dahl, 1967) (www.users.ox.ac.uk). Namun, setiap investigasi empiris dari respon sebuah kebijakan merupakan fakta yang rumit, bahwa peran kebijakan publik massa vis-à-vis opini publik adalah masalah yang sangat kompleks dan diperebutkan. Pertama, tidak dapat diterima begitu saja kongruensi bahwa antara opini publik dan kebijakan publik adalah sama dengan respon pemerintah. Aliran 'konsensus palsu' berpendapat bahwa massa opini publik adalah non-otonom di alam, dan karenanya sangat memungkinkan ciptaan dari para elite yang berkuasa. Akibatnya, konsensus antara pendapat dan kebijakan mungkin 'palsu' karena tidak berasal dari pendapat massa yang benar-benar independen, tetapi merupakan hasil dari proses manipulatif (Brooks 1985, 1990). Kedua, bahkan ketika diasumsikan bahwa opini publik adalah otonom dan mampu mempengaruhi proses politik, sangat sulit untuk menetapkan secara empiris apakah korespondensi antara opini publik dan kebijakan adalah hasil dari kebijakan yang mempengaruhi opini publik atau sebaliknya, atau campuran proses timbal balik, atau, memang, apakah faktor luar, dengan mempengaruhi, telah menghasilkan hubungan yang palsu. Tidak

ada teknik analitis yang telah sepenuhnya berhasil dalam menangani masalah inferensi kausal.

III. KESIMPULAN

Sulit untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan mempengaruhi opini publik atau opini publik yang mempengaruhi kebijakan. Setidaknya ada faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik (<http://www.britannica.com>), yaitu:

1. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan opini dan sikap. Lingkungan sosial merupakan pengaruh yang paling luas: keluarga, teman, lingkungan sekitar, tempat bekerja, tempat ibadah, atau sekolah. Orang biasanya selalu mengatur sikapnya untuk menyesuaikan pada kelompok sosial yang lebih populer.
2. Media massa. Koran, radio, televisi, internet (termasuk email dan blog) memang merupakan pengaruh yang lebih kecil dari lingkungan sosial, tetapi pengaruhnya tetap signifikan, khususnya dalam menegaskan sikap dan opini yang sudah terlebih dahulu terbangun. News media fokus pada perhatian publik dalam beberapa personaliti dan isu, memimpin beberapa orang untuk membentuk opini tentang mereka. Pejabat pemerintah karena mencatat bahwa komunikasi untuk mereka dari publik cenderung untuk mengikuti *headline*. Media massa juga bisa juga bisa memperkuat sikap yang terpendam dan mengaktifkannya, mendorong orang untuk mengambil aksi.

Media massa memainkan peranan penting yang lain dengan mempersilakan individu mengetahui apa yang orang lain pikirkan dan dengan memberikan pemimpin politik bagi khalayak. Dalam wilayah dimana media massa sedikit tersebar, seperti di negara berkembang atau negara dimana media dikontrol dengan ketat, kata sewaktu-waktu bisa melaksanakan fungsi yang sama sebagai press dan penyiaran, meskipun dalam skala yang lebih terbatas.

3. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan, LSM, kelompok agama, dan kelompok buruh mengolah formasi dan menyebarkan opini publik dalam isu yang menyakut konstituensnya.
4. Opinion leaders. Opinion leader memainkan peran yang besar dalam mendefinisikan isu populer dan dalam mempengaruhi opini individu mereka.

Daftar Pustaka

- Crespi, Irving. 1988. *Public Opinion. Polls, and Democracy*. Boulder – San Fransisco – London. Westview Press.
- Macdoulall, D. Curtiss. 1952. *Understanding Public Opinion: A Guide for Newspapermen and Newspaper Readers*. The Magmillan Company. New York.
- Powell, Norman John. 1951. *Anatomy of Public Opinion*. Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, Inc.
- <http://www.britannica.com>. W. Philip Davison. Public Opinion.
- users.ox.ac.uk. Sara Binzer Hobolt dan Robert Klemmensen. Responsive Government? Public Opinion and Government Policy Preferences in Britain and Denmark. Published by Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
- <http://www.templejc.edu/dept/Govt/feagin/govt2301/ppt/opinion.ppt>
ptcdn.salihara.org. Dodi Ambardi. Opini Publik: Teori, Aplikasi, dan Kontroversi. Makalah. Makalah ini disampaikan dalam diskusi “Opini Publik Versus Kebenaran” di Komunitas Salihara, Jakarta, Rabu 26 Mei 2010.